

TRANSFORMASI GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) MENUJU MASYARAKAT CIVIL SOCIETY PASCA MOU HELSINKI

Usman¹, Akhyar², Teuku M. Husni³

^{1,2,3}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Abulyatama,
email: usman@abulyatama.ac.id

Abstract: *The aim of this study was to illustrate and analyze GAM's transformation from armed movement to a social, political and economic movement, as well as the development of leadership and entrepreneurship to increase the dignity of combatants. This research uses the research type of literature and field study using qualitative approach that is descriptive explorative. Explorative research aims to describe in more detail the status of the state of social phenomena involving humans as an instrument of data collection. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The result of this research shown that Free Aceh Movement transforming from armed movement to social, political and economic movement and becoming civil society society. Civil society is the basis of modern democracy. Civil society is based on the principles of tolerance, decentralization, citizenship, activism in the public sphere, voluntary, self-sufficient, self-reliant, autonomous, and constitutionalism. As an effort in the process of social, political and economic change GAM combatants established political parties. Political parties became one of the vehicles for GAM to continue to fight for Aceh's interests. With a political party, GAM can compete to place its representation in the legislative seat in the General Election. GAM combatants continue to transform into individuals from the community to a democratic civil society in performing their roles and functions in the social environment.*

Keywords : *Up GAM Reformation, Toward Civil Society, Local Political Party*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis transformasi GAM dari gerakan bersenjata menjadi sebuah pergerakan sosial, politik dan ekonomi, serta pengembangan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) untuk meningkatkan harkat martabat para kombatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dan lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif eksploratif. Penelitian eksploratif bertujuan menggambarkan secara lebih rinci tentang status keadaan fenomena sosial yang melibatkan manusia sebagai instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Gerakan Aceh Merdeka melakukan transformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan sosial, politik dan ekonomi dan menjadi masyarakat *civil society*. *Civil society* merupakan basis kehidupan demokrasi modern. *Civil society* berlandaskan pada prinsip-prinsip toleransi, desentralisasi, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik, sukarela, swasembada, swadaya, otonom, dan konstitusionalisme. Sebagai sebuah usaha dalam proses perubahan sosial, politik dan ekonomi para kombatan GAM mendirikan partai politik. Partai politik menjadi salah satu kendaraan bagi GAM untuk bisa terus memperjuangkan kepentingan Aceh. Dengan partai politik, GAM bisa ikut berkompetisi untuk menempatkan perwakilannya di kursi legislatif dalam Pemilu. Kombatan GAM terus bertransformasi menjadi individu dari masyarakat menuju masyarakat *civil society*

yang demokratis dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

Kata kunci : Transformasi GAM, Menuju Masyarakat Civil Society, Partai Politik Lokal.

Aceh merupakan daerah yang dilanda konflik berpanjangan dimulai sejak tahun 1953 yang dipelopori oleh Teungku Daud Beureueh dengan memproklamkan gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DI TII. Munculnya gerakan itu akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang ingin melebur Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Penggabungan dua provinsi ini membawa konsekuensi dihapusnya hak istimewa bagi masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Konflik ini akhirnya dapat reda dengan diberikannya status istimewa bagi Aceh dengan otonomi luas dalam bidang agama adat dan pendidikan pada tahun 1959.

Konflik Aceh muncul kembali pada akhir 1976 ketika Hasan Tiro memproklamkan kemerdekaan Aceh 4 Desember 1976. Masyarakat Aceh menganggap pemerintah Jakarta tidak adil dalam mengeksploitasi kekayaan alam Aceh, hasil tambang minyak dan gas yang cukup besar itu tidak memberikan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Aceh. Memang pemerintah Orde Baru yang mengejar pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat aspek keadilan dan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Akibatnya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi secara besar-besaran itu kurang memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

Sebagian masyarakat Aceh menentang ketidakadilan itu dengan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Jakarta menganggap GAM sebagai sebuah gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari wilayah RI. Gerakan itu berusaha ditumpas dengan berbagai cara seperti pemberlakuan Operasi Jaring Merah OJM yang menjadikan sebagian wilayah Aceh sebagai Daerah Operasi Militer DOM. Meskipun demikian perlawanan GAM tidak pernah sepenuhnya berhasil ditumpas.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menerapkan kebijakan yang berbeda. Mereka melakukan dialog dengan posisi yang setara dengan dibantu mediator yang cukup netral. Hasilnya adalah Momenandum of Understanding MoU Helsinki. MoU tersebut telah mengantarkan adanya proses perdamaian di Aceh. Kelompok GAM mau berdamai dengan pemerintah Indonesia. Selama 30 tahun GAM melakukan pemberontakan untuk

memisahkan diri dari pemerintah Indonesia. Banyak korban berjatuhan akibat pemberontakan ini baik di kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI), GAM maupun rakyat sipil. Sulit mendapatkan data yang akurat tentang jumlah korban tersebut karena pihak-pihak yang terkait berkepentingan untuk melebihkan atau mengurangi jumlah korban jiwa. Kesulitan juga dijumpai untuk menemukan data yang lengkap mengenai kerugian material seperti rumah dibakar atau dirusak harta dijarah perusakan ladang atau kebun dan lain sebagainya.

Diantara butir kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, ada pemberian amnesti kepada anggota GAM berikut pemulihan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Sebagai konsekwensi dari kesepakatan MoU Helsinki, GAM di haruskan membubarkan sayap militernya, Tentara Nanggroe Aceh (TNA). GAM selanjutnya mendirikan sebuah organisasi baru yang di beri nama Komite Peralihan Aceh (KPA).

Proses ini akan menjadi babak baru bagi GAM untuk melakukan transformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan sosial, politik dan ekonomi untuk menjadi masyarakat *civil society* dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Aceh. *civil society* merupakan basis kehidupan demokrasi modern. *Civil society* berlandaskan pada prinsip-prinsip toleransi, desentralisasi, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik, sukarela, swasembada, swadaya, otonom, dan konstitusionalisme.

Mantan kombatan GAM (gerakan aceh merdeka) terus mentransformasi diri menjadi individu dari masyarakat *civil society* yang mempunyai hak sosial, politik dan ekonomi yang di mana di saat terjadi konflik para kombatan GAM tidak mempunyai hak sosial, berpolitik dan ekonomi karena terus di buru oleh pemerintah Indonesia karena telah melawan negara dengan mengibarkan bendera bulan bintang. Setelah terjadinya nota kesepakatan damai GAM (gerakan aceh merdeka) dan pemerintah Indonesia terjadinya transformasi struktur dan peran kombatan GAM menjadi masyarakat *civil society* yang mana para kombatan GAM menjadi individu penggerak pembangunan Aceh baik secara sosial, politik dan ekonomi dalam konsep kota madani.

Ada beberapa karakteristik yang bisa dikatakan sebagai ciri-ciri dari masyarakat yang dicita-citakan (masyarakat madani). Karakteristik tersebut adalah : a) masyarakat demokratis,

b) masyarakat yang menjunjung dan menghargai tinggi HAM, c) masyarakat yang mempunyai komitmen tinggi bagi tegaknya hukum d) masyarakat yang profesional.

Masyarakat madani mensyaratkan adanya *civic engagement* yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. *Civic engagement* ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antar satu dengan lain yang sangat penting artinya bagi bangunan politik demokrasi. Masyarakat madani (*civil society*) dan demokrasi bagi Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus. Tatanan nilai-nilai masyarakat tersebut ada dalam masyarakat madani. Karena itu demokrasi membutuhkan tatanan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat madani.

Sebagai perwujudan masyarakat madani secara konkret dibentuk berbagai organisasi-organisasi di luar negara yang disebut dengan nama NGO (*Non-Government Organization*) yang di Indonesia dikenal dengan nama lembaga swadaya masyarakat (LSM). Masyarakat madani dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra dan partner kerja lembaga eksekutif dan legislatif serta yudikatif juga dapat melakukan kontrol sosial (*social control*) terhadap pelaksanaan kerja lembaga tersebut. Dengan demikian masyarakat madani menjadi sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi.

Pemerintahan demokrasi membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya *performed* (eksis dan tegak). Kultur demokrasi itu berada dalam masyarakat itu sendiri. Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Karena itu harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem lainnya (Mujani, 2002). Untuk itu masyarakat harus menjadikan demokrasi sebagai *way of life* yang menuntun tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dan lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif eksploratif. Penelitian eksploratif bertujuan menggambarkan secara lebih rinci tentang status keadaan fenomena sosial yang melibatkan manusia sebagai instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah MoU helsinki terjadi perubahan dari anggota GAM menjadi masyarakat sipil yang harus berperilaku demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang penuh dengan tata aturan atau tata hukum yang harus di patuhi mantan anggota kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Sikap saling bekerjasama antar warga masyarakat dengan paradigma saling memiliki pikiran-pikiran yang positif (*positive thinking*). Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada yang merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.

Masyarakat Aceh yang yang terkotak-kotak di sebab konflik berperang antara GAM dengan Pemerintah Indonesia dengan masing-masing penuh curiga kepada lainnya bukan saja mengakibatkan tidak efisiennya cara hidup demokrasi, tapi juga dapat menjurus pada lahirnya pola tingkah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai asasi demokratis. Pengakuan akan kebebasan nurani (*freedom of conscience*), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (*egalitarianisme*) dan tingkah laku penuh percaya pada itikad baik orang dan kelompok lain (*trust attitude*) mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis. Pandangan kemanusiaan yang negatif dan pesimis akan dengan sendirinya sulit menghindari perilaku dan tidak percaya kepada sesama manusia, yang kemudian ujungnya ialah keengganan bekerjasama. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terus bertransformasi menjadi menjadi bagian dari masyarakat civil society baik sosial, politik dan ekonomi dalam menciptakan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Aceh yang baik kedepan tanpa adanya konflik yang merusak hubungan antar masyarakat.

Bidang Sosial

Ketegangan yang terjadi antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah cukup meresahkan warga khususnya warga yang berada di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu berada dalam keadaan seimbang seperti apa yang dikatakan dalam teori fungsionalisme, tetapi dalam masyarakat rentan terjadi konflik, karena pada hakikatnya masyarakat selalu berkembang dan mengalami perubahan.

Menurut Lewis A Coser konflik merupakan peristiwa normal yang dapat memperkuat struktur hubungan-hubungan sosial. Tidak adanya konflik dalam masyarakat tidak dapat dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas hubungan sosial masyarakatnya. Setelah itu ada tahap pemulihan atas konflik yang terjadi. Mantan kombatan GAM mulai membaaur dengan masyarakat, para kombatan kembali ke desa-desa yang kemudian terjadi adanya rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang rusak akibat konflik. Kemudian ada juga kebutuhan untuk berintegrasi, namun pada mantan kombatan GAM ini masih dipertanyakan. Mereka perlu beradaptasi kembali dengan lingkungan yang baru, karena kehidupan mereka yang selama ini memang menjauhkan diri dari keadaan yang semestinya.

Kombatan GAM dan tahanan politik yang kembali lebih dahulu ke desa tidak menimbulkan masalah, seringkali merupakan waktu yang membahagiakan bagi yang mereka kembali dan bagi warga desa. Sebagian besar dari GAM yang aktif (80%) kembali ke desa pada dua bulan setelah penandatanganan MoU. Dalam hampir banyak kasus, tingkat penerimaan terhadap anggota GAM yang kembali cukup tinggi; 90% anggota GAM dilaporkan tidak menghadapi masalah yang berat dan jikalau ada masalah bukanlah yang besar.

Hal ini terjadi karena mereka yang telah kembali ke desa dan mengenali wajah-wajah warga desanya. Sebagian besar kombatan juga berusaha pulang ke kampung halamannya untuk waktu yang pendek ketika konflik terjadi. Lebih dari 1/3 dari anggota GAM yang disurvei dan kembali ke kampung halaman mengindikasikan bahwa upacara tradisional (*peusijek*, yang juga dikenal dengan *tepung tawar*) atau *kenduri* diadakan untuk menyambut kedatangan mereka.

Bidang Politik

Langkah GAM untuk melakukan transformasi dalam sektor politik dalam mewujudkan *Good Citizen* dan *Good Governance* masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Keberadaan Partai GAM dalam mewarnai perpolitikan Aceh patut mendapat apresiasi. Perubahan pola perjuangan dari gerakan bersenjata menjadi gerakan politik menuntut sebuah kesiapan baik dari internal organisasi maupun dukungan kondisi lingkungan seperti perangkat kebijakan dan perundangan yang menunjang.

Sebagai sebuah usaha dalam proses perubahan, keberadaan partai politik dalam tubuh GAM menjadi signifikan. Sebab, parpol adalah menjadi salah satu kendaraan penting bagi GAM untuk bisa terus memperjuangkan kepentingannya dalam arena politik. Dengan memanfaatkan parpol, GAM bisa ikut berkompetisi untuk menempatkan perwakilannya di kursi legislatif dalam Pemilu mendatang.

Adanya perubahan pola "perjuangan" dari bentuk perlawanan bersenjata menjadi sebuah gerakan politik membawa dampak yang cukup besar di internal GAM. Pimpinan GAM membentuk Majelis Nasional sebagai badan yang berwenang untuk mengurus politik dan Komite Peralihan Aceh (KPA) untuk memantau proses demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan.

Pendirian Majelis Nasional adalah sebagai lembaga yang menyatukan seluruh sumberdaya politik dan ekonomi GAM. Salah satu butir kesepakatan dalam kesepakatan damai Helsinki adalah partai lokal. Butir 1.2.1 MoU Helsinki tertulis, "Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional..."

Produk hukum sebagai implementasi butir di atas adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Diboolehkannya pendirian partai lokal di Aceh adalah hal maju dalam sejarah penyelesaian konflik Aceh. Saat perundingan damai di era Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah kala itu tidak mengizinkan adanya partai lokal sebagai salah satu cara untuk membujuk GAM mengakhiri perjuangan bersenjata dengan memberi kesempatan mereka menyalurkan hak politik dalam pemilu seperti halnya Sinn Fein di Irlandia Utara maupun *Partie Quebecois* di

Kanada.

Perundingan yang dimediasi oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari menghasilkan enam poin utama, yaitu terkait dengan: 1) Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh; 2) Hak Asasi Manusia; 3) Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat; 4) Pengaturan keamanan; 5) Pembentukan misi monitoring Aceh; dan 6) Penyelesaian perselisihan. Perundingan Helsinki menjadi titik balik transformasi konflik yang merubah konstelasi sosial, politik dan budaya di Aceh. Secara politik, kondisi ini menjadi *political opportunity* bagi pihak GAM untuk masuk dalam struktur politik sebagai sarana untuk mengartikulasi aspirasi dalam ruang demokrasi.

Dalam hal partisipasi politik misalnya, Aceh memiliki izin untuk mendirikan partai politik lokal sebagai kendaraan politik para pejuang GAM dan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Sebelum kendaraan politik terbentuk, untuk mengakomodir hak politik mantan kombatan GAM dan rakyat Aceh, maka pada pemilihan kepala daerah perdana pasca MoU Helsinki boleh menggunakan jalur perseorangan atau jalur independen.¹⁰

Sebagai manifestasi butir-butir kesepakatan damai MoU Helsinki, pemerintah pusat melahirkan Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang menjadi dasar terlaksananya kesepakatan MoU Helsinki. Dalam undang-undang tersebut mengatur segala turunan butir-butir MoU Helsinki, termasuk tentang aspirasi politik dan pendirian Partai Politik lokal di Aceh.

Adanya perubahan pola "perjuangan" dari bentuk perlawanan bersenjata menjadi sebuah gerakan politik membawa dampak yang cukup besar di internal GAM. Pimpinan GAM membentuk Majelis Nasional sebagai badan yang berwenang untuk mengurus politik dan Komite Peralihan Aceh (KPA) untuk memantau proses demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan. Pendirian Majelis Nasional adalah sebagai lembaga yang menyatukan seluruh sumberdaya politik dan ekonomi GAM.

Bidang Ekonomi

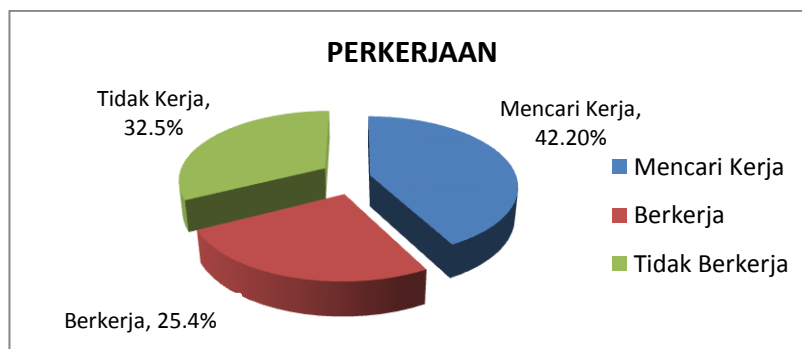
Menurut laporan Bank Dunia, hingga Februari 2006 kurang lebih 75 persen anggota GAM yang kembali ke masyarakat masih menganggur. Selain persoalan itu, kendati pemerintah mendirikan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang terdiri atas pemerintah, LSM, intelektual dan anggota GAM, lembaga ini tidak dapat berjalan dengan baik karena

kurangnya dana, kewenangan yang terbatas, ketidak jelasan tugas kerja dan program. Selanjutnya, LSM, intelektual dan anggota GAM menarik diri dari BRA.

Kini, masa depan Aceh berada di tangan pemimpin dari partai lokal Aceh tentu saja harus meninggalkan kebiasaan lamanya sebagai panglima perang. Ia tidak mungkin menggunakan kekuasaannya melalui paksaan kepada elite politik lainnya, terutama anggota DPRD, untuk mencapai tujuan politiknya. Masalah apa pun yang timbul antara pemerintah pusat di Jakarta dan aktor politik di Aceh harus diselesaikan melalui resolusi konflik yang demokratis, bukan dengan cara kekerasan.

Dalam konflik bersenjata yang terjadi di Aceh telah memberikan banyak akibat yang ditimbulkan olehnya, seperti kerusakan yang terjadi pada tempat-tempat kerja dan memperlemah pasar kerja, pelatihan dan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Ini diperlemah lagi dengan adanya peristiwa tsunami pada desember 2004. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya konflik memiliki dampak positif dan negatif. Namun pada hal yang disebutkan di atas itu merupakan dampak negatif konflik yaitu menimbulkan kerusakan secara fisik terlebih pasca tsunami.

Mencari pekerjaan adalah tugas berikutnya setelah lepas dari status kombatan. Tidak adanya perang telah menyebabkan sebagian besar eks GAM 'kehilangan' pekerjaan. Survei yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan lebih dari 70 persen GAM aktif memiliki status pengangguran.



Gambar 1. Status Pekerjaan GAM Aktif yang Kembali

Dalam penjelasannya, Bank Dunia merinci ada beberapa alasan mengapa GAM belum mulai bekerja. Pertama, anggota GAM ingin berkumpul sejenak dengan keluarga sekaligus memulihkan diri setelah melakukan 'perjuangan' di dalam hutan. Kedua, kurangnya modal dan kesempatan. Terakhir, masih menunggu izin komandan pasukan GAM. Di beberapa

tempat, pengaruh struktur komando GAM masih cukup kuat dalam menentukan arah selanjutnya.

Sekarang GAM terus mengtransformasi menjadi gerakan ekonomi rakyat Aceh dalam membangun perekonomian Aceh yang tertinggal di akibatkan oleh konflik yang berpanjangan sehingga merugikan harta benda masyarakat Aceh yang di korbakan untuk membangun sayap militer Aceh untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di sebabkan oleh tidak adilnya pemerintah Indonesia dalam pembangunan Aceh

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada hakikatnya konflik yang terjadi di Aceh antara pemerintah Indonesia dan GAM merupakan suatu bentuk konflik yang realitis, dimana konflik ini berasal dari kekecewaan kelompok (GAM) terhadap pemerintah Indonesia. Dalam konflik yang terjadi ini telah memberikan dampak negatif dengan adanya kerusakan pada sarana publik. Namun setelah adanya tsunami memunculkan adanya sisi positif konflik yaitu terjadinya Nota Kesepahaman Damai antara pemerintah Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dimotori oleh sebuah organisasi di bawah pimpinan Martti Ahtisaari (mantan presiden Finlandia) Crisis Management Initiative (CMI) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Dengan terjadinya perdamaian tersebut maka diharapkan kondisi ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Aceh meningkat berbarengan dengan stabilnya kondisi keamanan di Aceh.

Perjanjian ini tidak hanya membawa perubahan untuk konflik hampir 30 di bumi serambi mekah tetapi juga bagi organisasi GAM sendiri. Perjanjian itu tidak hanya sekedar mengharuskan GAM untuk meletakkan senjata. GAM kemudian harus memikirkan bentuk strategi baru dalam meneruskan "perjuangan" baik secara sosial, politik dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya para kombatan GAM.

Proses ini akan menjadi babak baru bagi GAM untuk melakukan transformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan sosial, politik dan ekonomi untuk menjadi masyarakat *civil society* dalam mencipatakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Aceh. *Civil society* merupakan basis kehidupan demokrasi modern. *Civil society* berlandaskan pada prinsip-prinsip toleransi, desentralisasi, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik,

sukarela, swasembada, swadaya, otonom, dan konstitusionalisme.

Sebagai sebuah usaha dalam proses perubahan sosial, politik dan ekonomi para kombatan GAM dengan adanya keberadaan partai politik dalam tubuh GAM menjadi signifikan. Sebab, parpol adalah menjadi salah satu kendaraan penting bagi GAM untuk bisa terus memperjuangkan kepentingannya dalam arena politik. Dengan memanfaatkan parpol, GAM bisa ikut berkompetisi untuk menempatkan perwakilannya di kursi legislatif dalam Pemilu mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Aliabbas. (2008). *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka*. Jakarta: lembaga kajian The Media Institute.
- Diyana Rahmawati. (2010). *Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) dalam Proses Disarmanent, Demobilitation, dan Reintegration (DDR) di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki 2005*. Semarang: universitas negeri Semarang.
- Ikrar Nusa Bhakti. (2008). *Beranda Perdamaian, Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Jakarta: Pakaust Pelajar-Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.
- M. Hamdan Basyar. (2010). Peran Elit Lokal dalam Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka GAM Pasca MoU Helsinki. *Jurnal Politik*.
- MS, Djohar. (2003). *Pendidikan Strategik, Alternatif Untuk Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta : Lesfi.
- Umar, Bukhari. (1999). Pembinaan Masyarakat Madani dan Kontribusi Pendidikan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Ta'dib*, 3(3).
- Mujani, Saiful. (2001). *Religious Democrats: Democratic culture and Muslim Participation in Post Suharto Era*. Columbus: Ohio State University.
- Rowland B. F. Pasaribu. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. *Jurnal Politik*.
- Karni, Asrori S. (1999). *Civil Society & Ummah*, Jakarta : Logos.
- World Bank (2006). *GAM Reintegration Needs Assessment: Enhancing Peace through Community-level Development Programming*. Banda Aceh/Jakarta: World Bank/DSF.